

**DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN
RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA JAYAPURA**

1. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Uu Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32/Prt/M/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia
7. Nomor : 07 /Prt/M/2012 Tentang Penyelenggaraan Penelitian, dan Pengembangan Di Bidang Jalan
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang ;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Permukiman;
10. PERMEN PU Nomor 05/Prt/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan ;
11. PP Nomor: 34 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan.
12. PERMEN PU Nomor: 43/Prt/M/2007 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi ;
13. PERMEN PU Nomor: 45/Prt/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;

14. KEPMEN PU Nomor: 349/Kpts/M/2004 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kontrak Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) ;
15. KEPMEN Permukiman Dan Prasarana Wilayah Nomor: 257/Kpts/M/2004 Tentang Standard An Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi ;
16. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan ;
17. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan;
18. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor . 34 Tahun 2006 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);